

**TESIS**

**PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
PADANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN  
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

**AYU CYANTHIA  
NIM. 1520112009**



Pembimbing I : Dr. Yuslim, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Suharizal, SH, MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ayu Cyanthia, SH,1520112009, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas,  
114 halaman Tahun 2018

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, peraturan daerah harus memenuhi persyaratan dan proses pembentukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan perusahaan daerah yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota termasuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang. Perubahan tersebut disikapi dengan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengamanatkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kota untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi, maka dari itu dalam tesis ini penulis ingin mengangkat bagaimana pengharmonisasian yang dilakukan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang terhadap rancangan Peraturan Daerah kota Padang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengharmonisasian dilakukan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kota Padang antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah belum memberikan gambaran secara rinci tentang pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan petunjuk bagi pemerintah daerah hingga saat ini belum diterbitkan dan kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi dan melibatkan perancang yang ada pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dan meningkatkan sumber daya dilingkungan Pemerintah Kota Padang dengan mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pengharmonisasian, Peraturan Daerah dan Legislasi

Harmonization of Padang City Regional Regulation Draft Regarding Amendment to Regional Regulation of Padang City Number 9 of 2013 concerning Organ and Personnel of Regional Drinking Water Companies After Enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Ayu Cyanthia, SH, 1520112009, Master of Law in Andalas University, 114 pages  
Year 2018

**ABSTRACT**

Regional Regulation is one type of legislation that is formed jointly by the Regional Government and DPRD to carry out regional autonomy and assistance tasks, regional regulations must fulfill the requirements and the formation process in accordance with the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Legislation. With the promulgation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the revocation of Law Number 5 of 1962 concerning Regional Government Enterprises and followed up with the promulgation of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Government Owned Enterprises has a profound influence on the existence of regional companies owned district / city government including Padang City Regional Drinking Water Company, The Amendment was addressed by Draft Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation of Padang City Number 9 of 2013 concerning Organ and Personnel of Regional Drinking Water Companies, Article 58 paragraph (2) Law Number 12 The year 2011 mandated the City District Government Legal Department to harmonize, round up and consolidate conception, so in this thesis the writer wants to raise harmonization between the Legal Affairs of the Padang City Government against the draft Regional Regulation of the City of Padang about Amendment to Regional Regulation of Padang City Number 9 of 2013 concerning Organ and Personnel of Regional Water Supply Companies. To answer the question above the author uses the sociological juridical method that is research that emphasizes the practice in the field associated with the legal aspects or legislation in force then related to the facts or facts in the field. Based on the results of the research, harmonization is carried out by the Legal Department of Padang City Government in accordance with the provisions of the legislation and obstacles faced by the Padang City Legal Department, among others Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally Owned Enterprises have not provided a detailed description of the management of Regional Public Companies and The Minister of Home Affairs Regulation, which is a guideline for local governments to date has not yet been issued and a lack of human resources. Efforts made by the Legal Department to overcome this include coordinating and involving designers in the West Sumatra Regional Office of Law and Human Rights and increasing the resources of the Padang City Government by holding Technical Guidance for the Formulation of Legislation.

**Keywords:**Harmonization, Local Regulation and Legislation